

## INTISARI

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan suatu program berbasis masyarakat pada bidang perumahan dalam rangka peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, serasi dan teratur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan program BSPS. Pada tahun anggaran 2020, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan bantuan perumahan dalam kegiatan peningkatan kualitas sebesar 7.077 alokasi yang tersebar pada 15 kabupaten/kota. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai tingkat efektivitas, pengendalian risiko dan proses pelaksanaan program sebagai tolak ukur pembangunan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengurangi rumah tidak layak huni di Indonesia.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebanyak 65 TFL sesuai dengan perhitungan *sampling* rumus Slovin. Analisis efektivitas program menggunakan bantuan aplikasi SPSS (versi 25). Pada analisis pengendalian risiko menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan matriks indeks kategori risiko dengan data yang diberikan kepada Tim SNVT Rumah Swadaya Provinsi Sumatera Utara sebagai *expert respondents*. Tahap analisis dimulai dengan melakukan pengelompokan data hasil kuesioner, interpretasi hasil dan pembobotan dari analisis data, dan merumuskan hasil temuan berdasarkan landasan teori.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan didapatkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program berjalan dengan sangat efektif walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan persentase rata-rata 86,61%. Dalam matriks indeks kategori risiko dari 18 sub variabel terdapat 7 sub variabel kategori rendah dan 11 sub variabel kategori sedang. Bobot persentase pengendalian risiko yang didapatkan berdasarkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu swadaya masyarakat 27,02%, pemahaman masyarakat tentang RLH 12,68%, dan kompetensi TFL 8,91%. Dalam pelaksanaannya aspek non teknis seperti peraturan-peraturan dan petunjuk teknis program yang sesuai dengan kebutuhan, letak geografis/lokasi dampingan, cuaca, dan adat istiadat berpengaruh paling besar terhadap keberlangsungan program.

Kata kunci: Program BSPS, Efektivitas, Pengendalian Risiko, Peningkatan Kualitas